

## BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

---

### LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

#### A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

- 1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB):
  - a. KBLI 81210 - Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, dan
  - b. KBLI 81300 - Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman, dan
  - c. KBLI 02409 - Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya (dapat melakukan Kerjasama Operasi/KSO), dan
  - d. KBLI 78300 - Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia atau 78200 - Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu.
- 2) Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
- 3) Badan usaha terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- 4) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 5) Tidak pernah menerima sanksi Pemutusan Kontrak dari PPK di lingkungan UI dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir terhitung sampai dengan jadwal Penetapan Pemenang;
- 6) Memiliki tenaga ahli yang bersertifikat *chainsaw*.
- 7) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
  - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 8) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
  - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
  - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.
  - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
  - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
  - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
  - d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
  - e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha

- sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- g. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
  - h. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 10) Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
  - 11) Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha nonkecil;
    - b. Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha kecil;
    - c. Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan koperasi;
    - d. Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil;
    - e. Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan koperasi; dan/atau
    - f. Koperasi dengan koperasi.

Dalam melaksanakan KSO, usaha kecil atau koperasi tersebut memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (*leadfirm*). *Leadfirm* kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
  - 12) kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
    - a. untuk jasa lainnya yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
    - b. untuk jasa lainnya yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
  - 13) Evaluasi persyaratan pada angka 11) huruf a. sampai dengan huruf f. dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

#### **B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia**

- 1) Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis (yaitu Penyedia Jasa Kebersihan) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
- 2) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran yaitu sebesar Rp9.385.609.625,15.

#### **C. Syarat Kualifikasi Keuangan Penyedia**

- 1) Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir (tahun 2022), dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki izin usaha KAP sesuai ketentuan perundang-undangan dan diregistrasi pada situs web Kementerian Keuangan dan/atau situs web Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) bagi usaha Non Kecil, dengan kondisi tidak mengalami kerugian.

- 2) Memiliki rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Agustus, September dan Oktober 2023 dengan saldo akhir setiap bulan minimal Rp2.143.130.000,00 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh riburupiah)
- 3) Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) **minimal senilai 50%** (lima puluh persen) dari nilai HPS. *[diisi dengan nilai perhitungan  $50\% \times$  nilai HPS. Contoh nilai HPS Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka minimal nilai SKN adalah  $50\% \times$  Rp 8.000.000.000,00 = Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)]*

**D. Dalam hal peserta melakukan KSO:**

- 1) evaluasi persyaratan pada angka A2, A4, A5, A7, A8 dan A9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;
- 2) evaluasi pada angka A.1)c. dan A6 dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu KBLI yang disyaratkan; dan
- 3) evaluasi pada angka B1, B2, C1, C2 dan C3 hanya dilakukan kepada leadfirm

**E. Data kualifikasi yang diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain:**

- 1) Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir (bila ada)
- 2) NIB
- 3) KSWP
- 4) Bukti Keanggotaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
- 5) Sertifikat tenaga ahli (Chainsaw)
- 6) Surat perjanjian kemitraan (jika bermitra)
- 7) Kontrak dan BAST pengalaman pekerjaan sejenis dalam 4 tahun terakhir
- 8) Kontrak dan BAST pengalaman sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan nilai minimal Rp9.385.609.625,15
- 9) KTP pengurus badan usaha
- 10) Laporan Keuangan Tahun 2022
- 11) Rekening Koran perusahaan 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September dan Oktober, 2023)